

**EVALUASI PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN *GOOD
GOVERNANCE*
DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

MUHAMMAD ZAKY HARAHAAP
NPP. 29.0146

*Asdaf Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Keuangan Publik*

Email :
zakyharahap.10@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *(Contains the background behind the research Tourism is one of the leading sectors in Maros Regency as a support for the community economy and regional development. One of the tourism objects that have potential which is also one of the icons of Maros Regency is the Rammang-Rammang tourist attraction. However, in its development there are still some obstacles, especially at this time with the Covid-19 pandemic the tourism industry has experienced a significant decline. Objective: to find out the right development strategy that can be applied by the Department of Culture and Tourism in developing tourism in Maros Regency, especially the development of the Rammang-Rammang tourist object Methode: This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation Result: tourism development, especially the Rammang-Rammang tourist attraction in Maros Regency is still not optimal, because there are still many weaknesses found in the components of the tourism development system which are indicators of the development of the Rammang-Rammang karst tourism object. The factors that influence the development of tourism are internal factors in the form of strengths and weaknesses and external factors are opportunities and threats. Based on these factors, researchers can formulate a number of strategies in tourism development, especially the development of the Rammang-Rammang tourist destination in Maros Regency, South Sulawesi Province. Conclusion: The development of the Rammang-Rammang Tourism Object has begun to be carried out in totality by utilizing the potential of the Rammang-Rammang Tourism Object such as its attraction which has extraordinary natural beauty and making several art performances to attract more public interest. Supporting factors in the development of the Rammang-Rammang tourist destination can be seen from the strategic geographical location of the Rammang-Rammang tourist attraction. Inhibiting factors in the development of the Rammang-Rammang tourist attraction include the lack of cooperation between the government and the community managing the attraction. In the development of tourism objects there are several strategies that can be applied, one of which is collaborating with POKDARWIS to create attractive photo spots at tourist attraction locations without damaging natural characteristics that attract tourists to carry out tourism promotion activities indirectly through uploading photos on their social media.*

Keywords: *SIPD Evaluation, SIPD Utilization, Regional Financial Management, SIPD*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Sistem Informasi Pemeintah Daerah (SIPD) memberikan manfaat dalam pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan teknologi informasi, perangkat keras maupun jaringan. Namun dalam pengoperasian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) masih banyak masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Medan khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), mulai dari pegawai yang belum mahir dalam penggunaan sistem tersebut. Bahkan fasilitas pendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) belum memadai, baik itu fasilitas perangkat keras maupun jaringan. Hal ini mengakibatkan manfaat Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mempercepat penyelesaian pekerjaan belum terwujud sepenuhnya. **Tujuan :** untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan** penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya efektif, dan tujuan dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) itu sendiri belum tercapai dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh pegawai yang masih belum mahir dalam penggunaan Sistem, belum adanya SOP dalam penggunaan sistem, fasilitas yang mendukung belum maksimal, jaringan dalam pengoperasian sistem terkadang eror, dan informasi yang ada belum terupdate di website. Karena belum maksimalnya dalam pengoperasian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Medan melakukan suatu upaya untuk mewujudkannya. **Kesimpulan:** penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya efektif, Karena belum maksimalnya dalam pengoperasian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Medan melakukan suatu upaya untuk mewujudkannya. Upaya yang dilakukan adalah terus melakukan pelatihan bagi pegawai mengenai pengoperasian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), memperbaharui cara rekrutmen pegawai, meningkatkan disiplin pegawai, mengoptimalkan jaringan, serta memperbaiki fasilitas. Saran dari penulis untuk pemerintah Kota Medan yaitu sering memberikan pelatihan agar pegawai semakin mahir, memberikan pegawai modul pengoperasian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), memasang antivirus untuk menjaga keamanan data, perawatan terhadap fasilitas.

Kata kunci: Evaluasi SIPD, Pemanfaatan SIPD, Pengelolaan Keuangan Daerah, SIPD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah saat ini sedang melakukan proses pembangunan yang lebih baik, menuju pemerintahan yang *good governance*. Pemerintah harus transparan dan akuntabel untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Good governance* memiliki karakteristik khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sebagai landasan awal diterapkannya *good governance*. Konsep *good governance* memiliki hubungan satu dengan lainnya, hubungan pemerintah sebagai pelayan dan masyarakat sebagai dilayani, sehingga ketika terciptanya hubungan tersebut maka adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah yang berpedoman dengan prinsip *good governance* dapat dijadikan sebagai suatu upaya untuk terwujudnya sistem demokrasi di pemerintah daerah yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat, ditegakkannya nilai-nilai keadilan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berbagai aspek kehidupan. Konsepsi pemerintahan pada dasarnya merujuk pada proses interaksi sosial politik, pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya menjalankan roda pemerintahannya sendiri namun adanya interaksi terhadap pihak eksternal yaitu pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah dengan sektor swasta. permasalahan yang dominan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah:

1. Tingginya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
2. Belum optimalnya kinerja.
3. Daya serap anggaran dan akuntabilitas yang belum optimal.

Menurut Halim (2007), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Hambatan dan kendala sistem informasi yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Medan adalah setruktur organisasi tidak sesuai misalnya nama pegawai yang sudah berubah namun masih ditemukan nama pegawai yang lama dan terbatasnya sumber daya aparatur yang benar-benar menguasai keahlian dibidang keuangan, sekaligus memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi sehingga dalam melakukan penyesuaian terhadap pengelolaan keuangan pengguna sistem Informasi Pemerintah Daerah mengalami hambatan, tidak tepat waktu dalam proses penggajian pegawai, belum sesuainya Rencana Anggaran Kas (RAK) per triwulan yang di input dengan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan dan ketika

bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) bendahara umum daerah melakukan kesalahan sehingga bendahara umum melakukan pembatalan penerbitan yang telah di input secara otomatis sistem tersebut akan melakukan pembatalan namun yang terjadi pada sistem dana tersebut tetap dianggarkan sehingga anggaran tersebut wajib di pertanggungjawabkan oleh bendahara umum daerah serta proses penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pegawai yang tidak efektif dan efisien diakibatkan belum integrasi data dalam sistem.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam usulan magang riset terapan pemerintahan dengan judul **“EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI PEMERINTAH KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA”**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memberikan manfaat dalam pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan teknologi informasi, perangkat keras maupun jaringan. Namun dalam pengoperasian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) masih banyak masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Medan khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), mulai dari pegawai yang belum mahir dalam penggunaan sistem tersebut. Bahkan fasilitas pendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) belum memadai, baik itu fasilitas perangkat keras maupun jaringan. Hal ini mengakibatkan manfaat Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mempercepat penyelesaian pekerjaan belum terwujud sepenuhnya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Asma Latifa (2021), berjudul “Efektifitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Payakumbuh sudah bisa dikatakan efektif. Namun jika dilihat dari teori Kenneth C. Laudon

dan Jane P. Laudon, bahwa dalam Dimensi Organisasi masih ditemui kekurangan pada indikator Sumber Daya Manusia yang belum memadai, masih kurang memahami pengoperasian Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) dan rekrutmennya masih belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, serta budaya kerja pegawai yang masih kurang disiplin waktu dalam melaksanakan pekerjaan. Dimensi Manajemen sudah lumayan bagus. Karena pimpinan sudah bisa membuat suatu keputusan dari informasi yang ada, namun belum sepenuhnya menggunakan Sistem Informasi Elektronik (SIE).

Kedua, I Made Suyana Utama (2017) , berjudul “Analisis Penerapan SIPKD Pada Pemerintah Provinsi Bali” .menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Bali sudah efektif. Kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah dan kulaitas pelayanan yang berbasis aplikasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna dan organisasi.

Ketiga, Maulana Yusuf (2016) , berjudul “Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Apparalang Sebagai Tujuan Wisata” .menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Sistem ini berbasis elektronik yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mampu menghubungkan dan menangani konsolidasi data, sehingga data pengelolaan keuangan daerah dapat terintegrasi dengan baik..

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dam merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Riset terapan pemerintahan ini dilaksanakan dengan tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kota Medan
2. Untuk menganalisis hasil evaluasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip *Good Governance*

II. METODE

Nazir (Nazir, 2014:153) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif termasuk jenis dari “field research approach”, artinya cara pengumpulan data penelitian dilakukan di lapangan secara total. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) juga membantu pemerintah. dalam tahap pertanggungjawaban, yaitu dalam membuat laporan keuangan. Mengevaluasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Medan, yaitu dengan menghubungkan hasil wawancara, observasi atau pengamatan di lapangan, serta dokumentasi, dengan menggunakan Konsep Model Evaluasi Stufflebeam (2003). Teori ini mengemukakan bahwa evaluasi sistem informasi berbasis computer dapat dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut adalah evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Berikut dijelaskan dimensi evaluasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai berikut .

A. Dimensi Evaluasi Konteks

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Aparat Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2016-2021. Berdasarkan pertimbangan ini maka Renstra SKPD disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun.
2. Memudahkan seluruh jajaran Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan kegiatan.
3. Memudahkan seluruh jajaran Aparat Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) memahami dan menilai program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh BPKAD Kota Medan terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan penganggaran belum dilakukan dengan baik, sehingga penyelenggaraan pengelolaan keuangan belum sepenuhnya berjalan dengan efisien.
2. Masih adanya pola pikir yang cenderung berorientasi “Proyek” (berorientasi jangka pendek dan berkonotasi duit) dan bukan orientasi “Program” (jangka panjang dan berkonotasi sebagai gerakan pembangunan).
3. Ada kalanya peraturan yang tersedia yang tidak saling mendukung satu dengan lainnya sehingga menimbulkan persoalan pada saat penerapannya.
4. Belum optimalnya kualitas SDM aparatur pengelola keuangan baik dalam hal kapabilitas (keterampilan teknis & wawasan) maupun profesionalitasnya.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kota Medan

Tujuan adalah pernyataan pernyataan tentang hal hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Medan adalah :

1. Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah yang efektif dan efisien
2. Aparatur pengelola keuangan yang memiliki kompetensi ideal

a. Strategi

- Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah.
- Transparansi dan akuntabilitas Pertanggungjawaban keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang berkualitas dari segi konten dan kemudahan aksesibilitas

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut adalah arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan :

- Penganggaran berbasis kinerja
- Penerapan sistem akuntansi dan pelaporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Upgrade konten dan aksesibilitas serta kemampuan operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

3. Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Bagian ini akan menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BPKAD Kota Medan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun (tahun 2016- 2021).

B. Evaluasi Input

1. Mengidentifikasi dan Menilai Kemampuan Sistem

Sistem informasi berbasis komputer dapat dikatakan efektif apabila memenuhi beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut adalah organisasi kebijakan dan sumber daya manusia . Berikut merupakan efektif sistem informasi:

a. Organisasi

Indikator penelitian dari dimensi organisasi yaitu kebijakan organisasi dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), struktur organisasi, dan budaya organisasi. lebih, yang memiliki ikatan dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

b. Kebijakan Organisasi dalam Penerapan SIPKD

Kebijakan organisasi Pemerintahan Daerah Kota Medan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Dearah (SIPD), selama ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Tidak ada kebijakan baik dari Peraturan Daerah, maupun Peraturan Walikota mengenai pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Dearah (SIPD).

c. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang penting dalam menjalankan suatu organisasi, peran Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan. Semaju apapun teknolog dan informasi, namun jika tidak ada Sumber Daya Manusia (SDM) maka sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Selain yang mahir dalam bidang teknologi informasi.

C. Evaluasi Proses

Dalam mengelola laporan keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Medan sangat terbantu dengan adanya sistem aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Keuangan ini karena dapat memudahkan pegawai dalam menyusun laporan keuangannya, staf keuangan yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan tinggal menginput data-data transaksi ke dalam jurnal yang sudah terintegrasi langsung untuk membuat laporan keuangan.

1. Komunikasi

Penerapan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan penerapan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan , dalam hal ini kebijakan penerapan SIMDA Keuangan. Informasi yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa kebijakan yang kompleks membutuhkan kerja sama banyak orang. Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam penerapan kebijakan diantaranya yaitu komunikasi yang cukup kepada para implementor.

2. Sumber Daya Manusia

penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan didukung oleh beberapa faktor dalam hal Sumber Daya Manusi (SDM) nya, yaitu :

1. Sumber daya manusia yang memang handal/memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya,
2. Untuk penerapan SIPD Keuangan, pegawai dibekali dengan pelatihan rutin, seperti pelatihan SIMDA, diklat dan sebagainya,

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan polapola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

B. Evaluasi Produk

Dari hasil penelitian pada BPKAD Kota Medan, ditemukan berbagai beberapa karakteristik kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIPD Keuangan. tingkat kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan sudah baik.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Asma Latifa (2021), berjudul “Efektifitas Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Payakumbuh sudah bisa dikatakan efektif. Namun jika dilihat dari teori Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon, bahwa dalam Dimensi Organisasi masih ditemui kekurangan pada indikator Sumber Daya Manusia yang belum memadai, masih kurang memahami pengoperasian Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) dan rekrutmennya masih belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, serta budaya kerja pegawai yang masih kurang disiplin waktu dalam melaksanakan pekerjaan. Dimensi Manajemen sudah lumayan bagus. Karena pimpinan sudah bisa membuat suatu keputusan dari informasi yang ada, namun belum sepenuhnya menggunakan Sistem Informasi Elektronik (SIE). Dimensi Teknologi

sudah cukup baik, namun pada fasilitas yang mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Daerah (SIPD) masih kurang memadai. Dimensi Keahlian, Kebanyakan pegawai yang ada tidak memiliki keahlian teknologi maupun sistem informasi.

I Made Suyana Utama (2017) , berjudul “Analisis Penerapan SIPD Pada Pemerintah Provinsi Bali” .Adapun temuan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Bali sudah efektif. Kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah dan kulaitas pelayanan yang berbasis aplikasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna dan organisasi.

Maulana Yusuf (2016) , berjudul “Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Apparalang Sebagai Tujuan Wisata” . Adapun temuan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Sistem ini berbasis elektronik yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mampu menghubungkan dan menangani konsolidasi data, sehingga data pengelolaan keuangan daerah dapat terintegrasi dengan baik. Sistem ini menghasilkan suatu informasi yang akurat sehingga Pemerintah Daerah lebih mudah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya sendiri dan sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan penelitian diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,721.

Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya efektif,Karena belum maksimalnya dalam pengoperasian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Medan melakukan suatu upaya untuk mewujudkannya. Upaya yang dilakukan adalah terus melakukan pelatihan bagi pegawai mengenai pengoperasian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), memperbaharui cara rekrutmen pegawai, meningkatkan disiplin pegawai, mengoptimalkan jaringan, serta memperbaiki fasilitas. Saran dari penulis untuk pemerintah Kota Medan yaitu sering memberikan pelatihan agar pegawai semakin mahir, memberikan pegawai modul pengoperasian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), memasang antivirus untuk menjaga keamanan data, perawatan terhadap fasilitas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan , maka dapat disampaikan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Penerapan sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah masih terjadinya kendala sehingga kegiatan pengelolaan keuangan menjadi terhambat di Kota Medan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Kota Medan berkordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan melakukan evaluasi internal terhadap pengelolaan keuangan daerah .
2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan belum terwujudnya sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Governance* dikarenakan masih banyaknya permasalahan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah belum optimal dikarenakan masih banyaknya kendala dalam pengelolaan keuangan seperti : Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim, sistem yang kurang mendukung sehingga terhambatnya dalam pengelolaan keuangan dan program dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokasi saja yakni sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Stufflebeam

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basuki. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Harefa, Mandala, dkk. 2017. *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hartono, Bambang. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indrayani, Etin dan Gatningsih. 2013. *Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintahan: Konsep dan Aplikasinya pada Organisasi Pemerintahan/Pemda*. Bandung: IPDN Press.
- Khusaini, Moh. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- L. Gaol, Chr. Jimmy. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

